



Presepsi Masyarakat terhadap Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kampung Gurinda Jaya Kabupaten Merauke

Zahra Soraya¹, Godefridus Samderubun², Vincenzo R Serano³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Email: zahrasorayaaa@gmail.com¹

Received: 09-01-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 29-03-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di tingkat kampung yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya, Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparat kampung dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* belum berjalan optimal, ditandai oleh ketidaksesuaian waktu pelayanan dengan standar yang ditetapkan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi layanan, praktik keterbukaan yang belum konsisten, serta belum terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur, peningkatan disiplin dan integritas, serta penguatan komitmen pemerintah kampung dan partisipasi masyarakat merupakan implikasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, *Good Governance*, Pelayanan Publik

Abstract

This research is motivated by the suboptimal implementation of good governance principles in public services at the village level, which influences public perceptions of the performance of government officials. The purpose of this study is to analyze public perceptions of the implementation of the principles of accountability, transparency, openness, and the rule of law in public services in Gurinda Jaya Village, Merauke Regency, and to identify supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative approach with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation of village officials and community service users. The results indicate that the implementation of good governance principles has not been optimal, characterized by discrepancies in service delivery times with established standards, limited public understanding of service information, inconsistent transparency practices, and an unfulfilled sense of justice and legal certainty in public services. The study's conclusion confirms that strengthening apparatus capacity, improving discipline and integrity, and strengthening village government commitment and community participation are important implications for realizing more effective and accountable village governance.

Keywords: Public Perception, *Good Governance*, Public Services

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *good governance* menjadi tuntutan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk pada level pemerintahan kampung sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Konsep *good governance* tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang efektif, responsif, dan berkeadilan. Dalam perspektif Administrasi Publik, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, dan responsivitas menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik di tingkat lokal.

Secara konseptual, *good governance* mengedepankan keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan pemerintah kepada publik. Prinsip akuntabilitas menuntut aparatur kampung untuk mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan. Transparansi mengharuskan adanya akses informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sementara supremasi hukum menekankan konsistensi dalam penerapan aturan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Gustiani & Hertanto, 2024; Wahyuni, 2021).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di tingkat lokal masih menghadapi tantangan yang kompleks. Permasalahan seperti prosedur pelayanan yang berbelit, ketidakjelasan waktu penyelesaian layanan, rendahnya kapasitas aparatur, serta terbatasnya akses informasi publik masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal (Sama'ni, 2018; Dedi Ansari, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *good governance* dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya pada pemerintahan kampung yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan.

Dalam konteks wilayah timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Merauke, tantangan implementasi *good governance* menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Karakteristik masyarakat adat, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan publik di tingkat kampung. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya berbasis pada indikator administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam praktik pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya, di mana masih ditemukan berbagai

permasalahan dalam penerapan prinsip *good governance*. Beberapa indikasi yang muncul antara lain keterbatasan transparansi informasi terkait prosedur pelayanan, inkonsistensi dalam penerapan aturan, serta praktik pelayanan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Selain itu, masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa pelayanan publik cenderung lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan kampung belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat sebagai penerima layanan.

Dalam kerangka Teori Persepsi, persepsi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, karena mencerminkan pengalaman langsung dan interpretasi subjektif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pelayanan sebelumnya, tingkat pengetahuan masyarakat, serta interaksi antara aparatur pemerintah dan warga. Oleh karena itu, analisis terhadap persepsi masyarakat tidak hanya memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan layanan, tetapi juga mengungkap aspek-aspek kritis yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis persepsi masyarakat juga sejalan dengan prinsip *citizen-centered governance*, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif ini, keberhasilan implementasi *good governance* tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, penelitian yang berfokus pada persepsi masyarakat memiliki relevansi yang tinggi dalam mengembangkan model evaluasi tata kelola pemerintahan yang lebih kontekstual dan responsif.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya, Kabupaten Merauke? Fokus kajian diarahkan pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum dalam praktik pelayanan publik di tingkat kampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Good Governance pada level pemerintahan lokal, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah kampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan di wilayah perbatasan dan daerah 3T, yang selama ini masih relatif terbatas. Dengan mengangkat perspektif masyarakat sebagai subjek utama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai realitas implementasi *good governance* di tingkat kampung, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan model tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Papua Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya, Kabupaten Merauke. Fokus kajian diarahkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum dalam praktik pelayanan pemerintahan kampung. Subjek penelitian meliputi aparatur kampung dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, dengan kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam proses pelayanan serta pengalaman menerima layanan administrasi di kantor kampung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan publik, wawancara mendalam dengan aparatur kampung dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap dokumen pelayanan dan administrasi kampung yang relevan. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan mempertimbangkan posisi, peran, serta intensitas interaksi informan dengan pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance*, kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan pola praktik pelayanan, persepsi masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tata kelola pemerintahan kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Secara formal, aparatur kampung telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban administratif, seperti penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi pelayanan, serta penyampaian informasi melalui papan pengumuman. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa secara normatif prinsip akuntabilitas telah diadopsi dalam sistem tata kelola pemerintahan kampung.

Namun demikian, pada tataran implementasi, masyarakat masih mengalami ketidaksesuaian antara standar pelayanan yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut terlihat pada lamanya waktu penyelesaian dokumen administrasi yang seringkali melampaui batas waktu yang dijanjikan. Selain itu, pelayanan publik juga cenderung bergantung pada kehadiran

pejabat tertentu, sehingga ketika pejabat tersebut tidak berada di tempat, proses pelayanan menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan belum berbasis sistem yang kuat, melainkan masih bergantung pada individu aparatur.

Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas substantif. Dalam perspektif Good Governance, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan profesional aparatur dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan prosedur tanpa implementasi yang konsisten tidak cukup untuk mewujudkan akuntabilitas yang sesungguhnya.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di tingkat kampung masih berada pada tahap administratif (*administrative accountability*), belum berkembang menuju akuntabilitas publik (*public accountability*) yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh minimnya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau evaluasi terhadap pelayanan yang diterima.

Dari sisi sosiologis, rendahnya akuntabilitas juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi lokal yang belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Dalam konteks ini, relasi antara aparatur dan masyarakat masih bersifat hierarkis, sehingga masyarakat cenderung menerima kondisi pelayanan apa adanya tanpa memiliki posisi tawar yang kuat. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tekanan sosial terhadap aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa lemahnya disiplin aparatur serta kurangnya sistem pengawasan internal menjadi faktor utama rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Setiawan et al., 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas pelayanan publik tidak hanya membutuhkan perbaikan prosedur, tetapi juga transformasi budaya kerja aparatur dan penguatan sistem pengawasan yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

2. Transparansi Informasi Pelayanan

Transparansi informasi pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya menunjukkan adanya upaya formal dari pemerintah kampung dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Informasi terkait persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, serta biaya layanan telah disampaikan melalui media seperti papan pengumuman dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusional akan pentingnya transparansi sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, temuan penelitian mengungkapkan bahwa transparansi yang ada masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya efektif. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi

yang disediakan, baik karena keterbatasan akses, bahasa yang digunakan, maupun kurangnya sosialisasi secara aktif. Dalam praktik pengurusan dokumen tertentu, khususnya dokumen pertanahan, masyarakat menilai bahwa informasi terkait biaya dan waktu penyelesaian seringkali tidak konsisten dan berubah-ubah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan masih berada pada level penyediaan informasi (*information disclosure*), belum mencapai tahap transparansi yang fungsional (*functional transparency*). Dalam perspektif Administrasi Publik, transparansi yang efektif tidak hanya ditandai dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan keterpahaman (*comprehensibility*) dan keterjangkauan (*accessibility*) informasi oleh masyarakat.

Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara transparansi sebagai kewajiban administratif dengan transparansi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Transparansi yang tidak disertai dengan peningkatan literasi masyarakat cenderung bersifat simbolik, sehingga tidak mampu meningkatkan kontrol publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat tetap berada pada posisi pasif sebagai penerima informasi, bukan sebagai aktor yang mampu menggunakan informasi tersebut untuk mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik.

Dari sisi teoritis, kondisi ini memperkuat argumen bahwa transparansi harus dipahami sebagai proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya interaksi yang intensif, transparansi hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tanpa peningkatan kapasitas masyarakat akan menghasilkan transparansi semu (Azis, 2019).

Dengan demikian, peningkatan transparansi pelayanan publik di tingkat kampung perlu diarahkan pada penguatan komunikasi publik, penggunaan media yang lebih inklusif, serta peningkatan literasi masyarakat agar informasi yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Keterbukaan Aparatur terhadap Masyarakat

Keterbukaan aparatur kampung terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas interaksi antara pemerintah dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur kampung di Kampung Gurinda Jaya cukup terbuka dalam menerima pertanyaan dan keluhan masyarakat, terutama dalam interaksi langsung di kantor kampung. Aparatur cenderung tidak menutup akses masyarakat dan bersedia memberikan penjelasan terkait prosedur pelayanan. Namun demikian, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sikap responsif dan empatik yang konsisten. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan kurang ramah, terutama ketika terjadi keterlambatan atau ketidakjelasan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan

dalam arti akses belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas komunikasi interpersonal yang baik.

Dalam perspektif Teori Persepsi, pengalaman interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Sikap ramah, empati, dan responsivitas menjadi faktor penting yang menentukan apakah masyarakat merasa dihargai sebagai pengguna layanan. Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan sebagai prinsip *good governance* tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat kultural. Artinya, keterbukaan harus terinternalisasi dalam perilaku aparatur sebagai bagian dari etos pelayanan publik. Tanpa adanya internalisasi nilai tersebut, keterbukaan hanya akan bersifat formal dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, rendahnya konsistensi dalam sikap aparatur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti beban kerja, kurangnya pelatihan pelayanan publik, serta minimnya sistem evaluasi kinerja berbasis kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, aparatur cenderung menjalankan pelayanan secara rutin tanpa memperhatikan aspek kualitas interaksi dengan masyarakat.

Temuan ini memperluas hasil studi sebelumnya yang menekankan bahwa kualitas interaksi antara aparatur dan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam membangun legitimasi pemerintahan lokal (Aduwina, 2018). Dengan demikian, peningkatan keterbukaan aparatur tidak hanya membutuhkan kebijakan formal, tetapi juga penguatan kapasitas interpersonal dan etika pelayanan publik.

4. Aturan Hukum dan Keadilan Prosedural

Penerapan aturan hukum dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya menunjukkan bahwa secara formal telah terdapat pedoman dan prosedur yang mengatur mekanisme pelayanan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih memersepsikan adanya ketidakadilan dalam proses pelayanan, terutama terkait perbedaan perlakuan dalam pengurusan dokumen tertentu.

Beberapa masyarakat mengindikasikan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda antara satu warga dengan warga lainnya, yang menimbulkan kesan adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan formal telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya konsisten dan adil.

Dalam perspektif *good governance*, supremasi hukum tidak hanya berarti keberadaan aturan, tetapi juga konsistensi dalam penerapannya serta jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan prosedural (*procedural justice*) menjadi aspek penting dalam menilai apakah suatu sistem pelayanan publik telah berjalan secara adil dan transparan. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor subjektivitas dalam implementasi aturan oleh aparatur, yang dapat dipengaruhi oleh relasi sosial, kedekatan

personal, maupun kepentingan tertentu. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, persepsi ketidakadilan dalam pelayanan publik dapat berdampak luas terhadap legitimasi pemerintahan kampung. Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan prosedural merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi penilaian negatif masyarakat terhadap praktik tata kelola pemerintahan (Sari et al., 2022). Oleh karena itu, upaya perbaikan pelayanan publik harus diarahkan pada penguatan integritas aparatur serta penerapan sistem pengawasan yang mampu menjamin keadilan dalam setiap proses pelayanan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di Kampung Gurinda Jaya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor pendukung utama meliputi keberadaan aturan formal, struktur organisasi pemerintahan kampung, serta adanya kesadaran sebagian aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa secara institusional terdapat potensi untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang signifikan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur kampung seringkali harus menangani berbagai tugas secara bersamaan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan cenderung tidak mampu mengontrol kinerja aparatur secara efektif. Kondisi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat berada pada posisi yang lemah. Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *good governance* tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, interaksi antara kapasitas institusional dan kapasitas sosial menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Lebih lanjut, temuan ini memberikan kontribusi akademik dengan menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap *good governance* merupakan hasil dari interaksi kompleks antara regulasi, praktik

pelayanan, dan pengalaman sosial masyarakat. Dengan demikian, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara holistik, mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di tingkat kampung masih berada dalam tahap transisi dari tata kelola administratif menuju tata kelola yang berorientasi pada masyarakat. Meskipun telah terdapat upaya formal dalam menerapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten dan efektif.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *good governance* tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan prosedur, tetapi juga pada kualitas implementasi serta interaksi antara aparatur dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung, khususnya di wilayah seperti Papua Selatan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kampung Gurinda Jaya belum berjalan optimal. Akuntabilitas belum tercermin dalam kepastian waktu dan konsistensi pelayanan, transparansi informasi masih parsial dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat, keterbukaan aparatur belum diikuti oleh responsivitas yang konsisten, serta penerapan aturan hukum belum sepenuhnya menghadirkan keadilan prosedural. Temuan ini menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik *good governance* cenderung kritis karena masih terdapat kesenjangan antara prosedur formal dan praktik pelayanan sehari-hari. Secara teoretis, hasil penelitian menegaskan pentingnya membedakan antara pemenuhan aspek formal tata kelola dan kualitas implementasi substantif di tingkat pemerintahan kampung; secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur, disiplin pelayanan, dan konsistensi standar layanan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup studi kasus di satu kampung dan penggunaan pendekatan kualitatif yang menekankan persepsi subjek, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas. Arah penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif antar kampung atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara penerapan prinsip *good governance* dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduwina, R. (2018). Kualitas interaksi aparatur dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–156.
- Azis, A. (2019). Transparansi pelayanan publik dan akses informasi masyarakat di pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 23–34.
- Dedi Ansari, M. (2023). Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan

- Zahra Soraya et al**, Presepsi Masyarakat terhadap Penerapan Prinsip Good Governance di Kampung Gurinda Jaya Kabupaten Merauke pelayanan administrasi publik. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 41–53.
- Gustiani, N., & Hertanto, D. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan publik di pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 12(1), 1–12.
- Sama'ni. (2018). Problematika pelayanan publik di tingkat desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(2), 89–101.
- Sari, R. N., Pratama, A., & Lestari, D. (2022). Persepsi keadilan prosedural dalam pelayanan publik desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 201–212.
- Setiawan, B., Hidayat, R., & Kurniawan, T. (2017). Disiplin aparatur dan kualitas pelayanan publik di pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–66.
- Wahyuni, S. (2021). Good governance dan kualitas pelayanan publik pada pemerintah desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 98–109.
- Kurniawan, T. (2020). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 63–75.
- Prasetyo, E., & Rahmawati, N. (2019). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 117–129.